



# REVIU RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2021-2026



*KECAMATAN GEDANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2023*





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

**REVIU RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GEDANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KANTOR KECAMATAN GEDANGAN  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenannya Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Gedangan 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan***", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Gedangan periode 2021-2026.



Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidoarjo, 31 Maret 2023



INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Perbina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR BAGAN .....	7
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	8
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Landasan Hukum.....	16
1.3 Maksud dan Tujuan.....	22
1.4 Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi .....	21
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedangan.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan.....	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	47
2.5 Keterhubungan Dan Kesesuaian Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam Dokumen Renstra -Pd.....	56
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas & Fungsi PD.....	58
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	61
3.3 Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo.....	64
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	67
3.5 Penentuan Isu – Isu Srategis.....	68
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah.....	71
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	71



**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan .....	75
5.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan.....	77
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>80</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>94</b>

**LAMPIRAN**

1. Matriks Reviu Renstra 2021-2026
2. Form E.73
3. Form E.80
4. SOP Mekanisme Reviu Renstra 2021-2026



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan .....	34
Tabel 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan .....	34
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	35
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana.....	37
Tabel 2.6.	Matrik Pencapaian Kinerja .....	39
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan.....	45
Tabel 2.8.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra K/L51	
Tabel 2.9.	Matrik Tantangan dan Peluang .....	53
Tabel 2.10.	Telaah Renstra RTRT.....	54
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan	59
Tabel 3.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	60
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan .....	63
Tabel 3.4.	Kriteria Pembobotan .....	69
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedangan .....	73
Tabel 5.1.	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan .....	77
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan .....	81
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	92



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan ..... 32





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu pendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

#### a. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Renstra memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra pada dasarnya merupakan penjabaran dari RJPMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis. Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Renja). Dalam tahun



berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Periode Tahun 2021–2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melalui penyusunan Renstra ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "**Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan**", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target Renstra tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan serta merupakan sasaran akhir (*the ultimate goals*) pada Renstra. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 memiliki tantangan pembangunan yang cukup berat akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa memiliki dampak yang



lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang struktur ekonominya bertumpu pada sektor primer seperti pertanian. Dengan demikian, selaras dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan sosial.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



## **b. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil

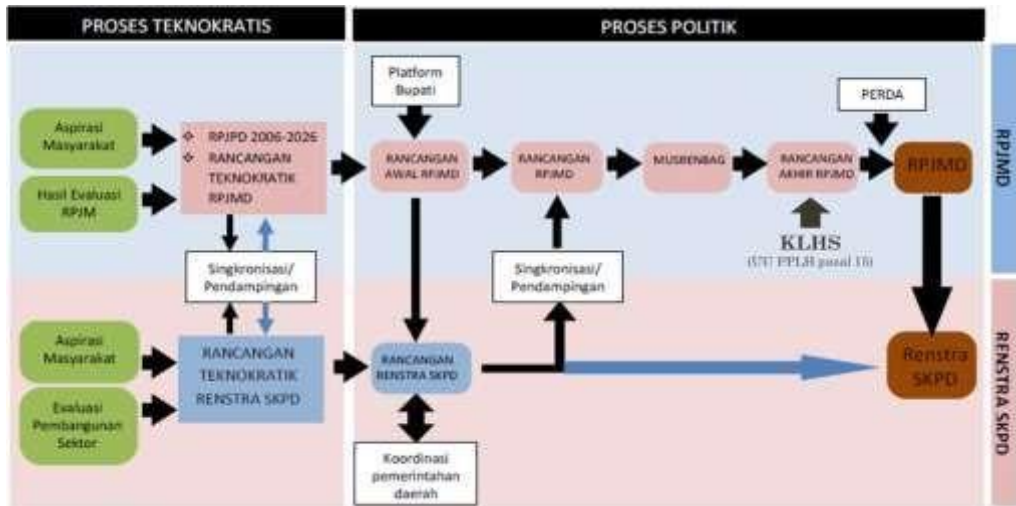
Dengan demikian fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

## **c. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses



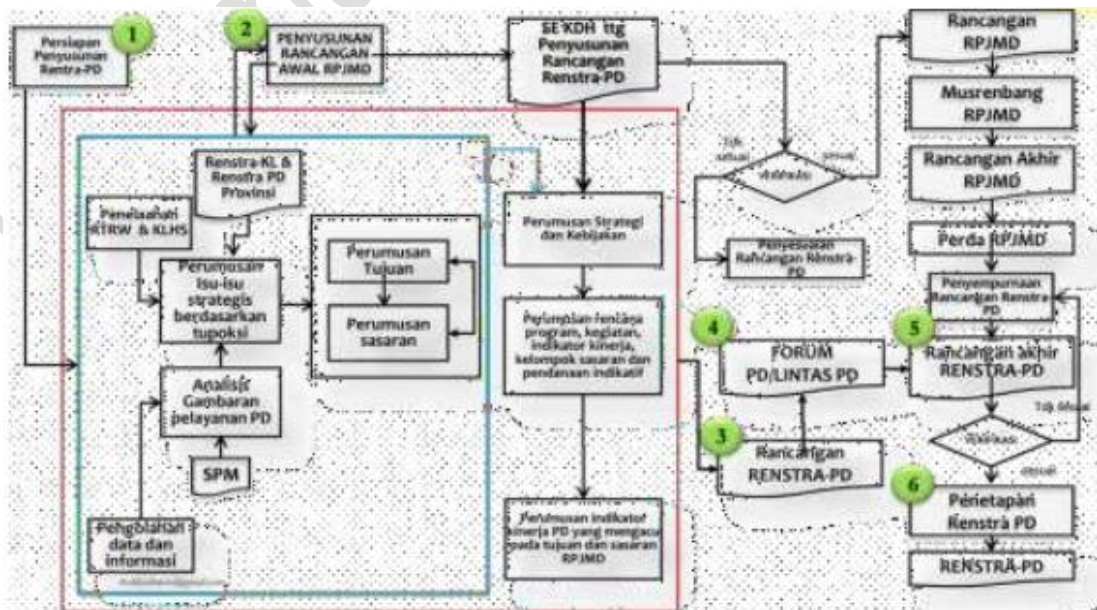
tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.



G

Gambar 1. 1 Arsitektur Kinerja Pembangunan

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1. 2 Bagan alur Penyusunan Renstra SKPD



Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Kecamatan Gedangan berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024 dan Renstra Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

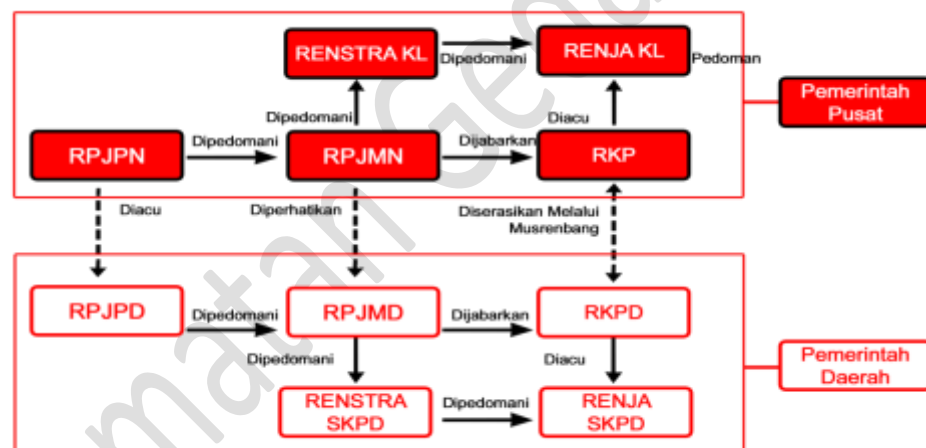
**d. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)



tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu





program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Gedangan dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.” dan misi kelima yaitu “Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga”.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pula Perubahan Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2001 Tentang Visi Dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



- 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Telah Diubah Lagi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ”;
  18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
  19. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
  21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
  22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
  23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;

24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Pemendagri 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Pemendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Pemendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
33. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;



34. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
42. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
43. Peraturan bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;



44. Peraturan bupati Sidoarjo No. 77 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
45. Peraturan bupati Sidoarjo No. 80 Tahun 2022 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gedangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan adalah untuk :

1. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
2. Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;

Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Gedangan setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Gedangan masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategi yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Kecamatan Gedangan serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

##### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026.

##### BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sampai dengan Tahun 2021.

##### BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Gedangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.





## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Memuat pedoman Indikator Kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Gedangan merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gedangan, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan Kecamatan Gedangan.

## LAMPIRAN



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo berbunyi sebagai berikut:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unsur di dalam struktur organisasi Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

##### 1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya. Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani:

- a. IMB sesuai kewenangan;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara;



- c. Legalitas salinan dokumen kependudukan
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV dan AKV);
- e. Rekomendasi izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/desa.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menerjemahkan rincian-rincian tugas kesekretariatan. Sub Bagian tersebut antara lain:

### a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- 3) Menerima Permohonan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
- 4) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Teknis Kegiatan dibidang Pemerintahan;
  1. Pengesahan Pengantian antar waktu dan Pemberhentian karena
  2. Pengantian antar waktu anggota Badan Permusyawarah Desa
  3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa



4. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawarah desa
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas bidang pemerintahan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugasnya

#### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain ;
  1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
  2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan /reklame liar)
  4. Penanganan Konflik sosial
- c. Memproses Permohonan Izin Gangguan usaha mikro
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan Tugas bidang lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya



#### 5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang perekonomian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perekonomian;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
- e. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan;
- f. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wira usaha baru;
- j. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besardengan lembaga ekonomi pedesaan;
- k. Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
- l. Promosi produk industri dan dagang kecil dan mikro;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dalamPeningkatan Ekonomi Lokal(P3EL);
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan
- i. ProgramKecamatanRamah Anak (CaRa);
- j. Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria;
- k. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS;
- m. Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

#### 7. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan fisik. Seksi Pembangunan Fisik dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkedudukan di bawah dan



bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembangunan fisik;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan fisik;
- e. Pemeliharaan rutin jalan lokal desa;
- f. Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro diwilayah pennukiman;
- g. Melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalandes;a;
- h. Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS);
- i. Inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah;
- j. Pemeliharaan saluran tersier;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

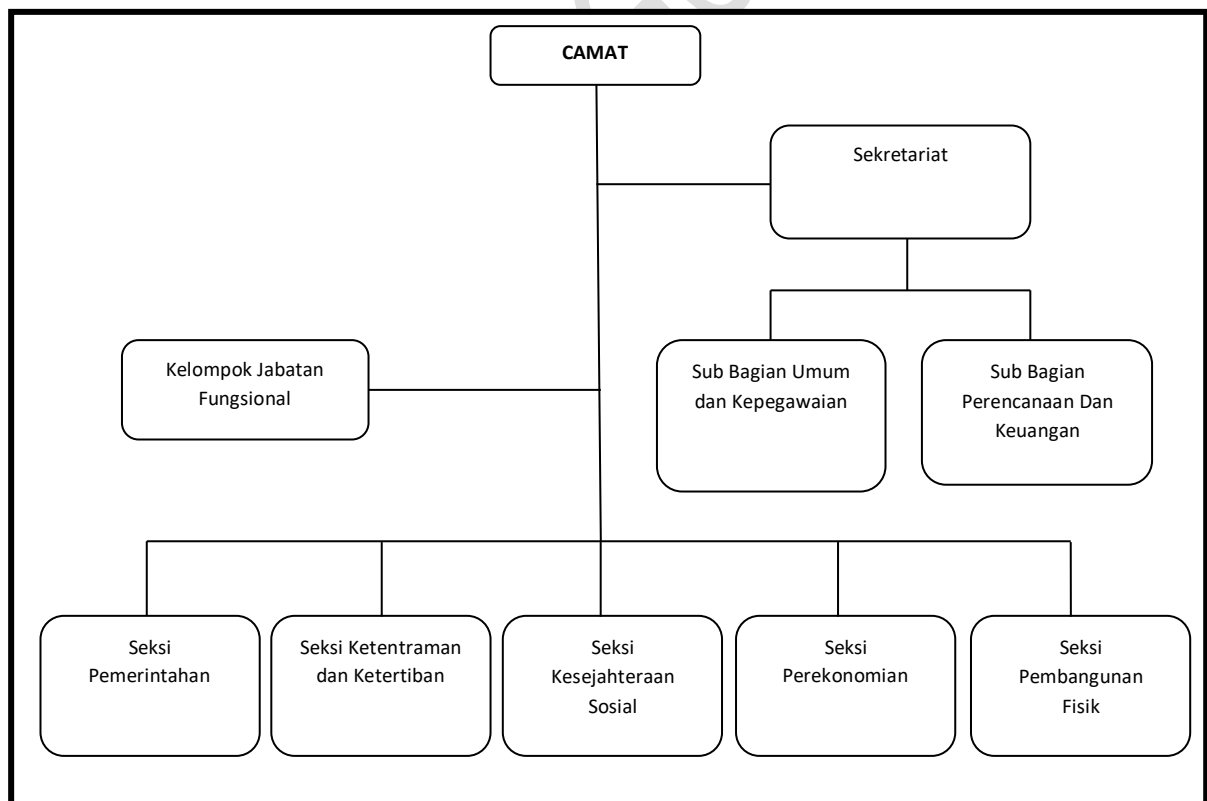
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Gedangan terdiri dari :





- a. Unsur Pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi terdiri dari :
  - Seksi Pemerintahan
  - Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - Seksi Pembangunan Fisik
  - Seksi Kesejahteraan Sosial
  - Seksi Perekonomian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan 2.1.**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan**





## 2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GEDANGAN

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Perangkat Daerah adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dan sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya serta aset dan potensi yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata fisik dan non fisik dalam merealisasikan tujuan organisasi. Susunan kepegawaian di Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Kondisi Kepegawaian Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo**  
**Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

NO	URAIAN	GOLONGAN								HONORER			JUMLAH
		IV		III		II		I		L	P	Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	CAMAT		1										1
2	SEKRETARIAT	1		1	3	1	1			4	4	8	15
3	SEKSI PEMERINTAHAN			1		1				1		1	3
4	SEKSI PEMBANGUNAN FISIK				1	2				4		4	7
5	SEKSI KESOS				2						1	1	3
6	SEKSI TRANTIB			1		5				5		5	11
7	SEKSI PEREKONOMIAN			1	1							0	2
	<b>JUMLAH</b>	1	1	4	7	9	1	0	0	14	5	19	<b>42</b>



Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Gedangan sebanyak 42 orang dengan rincian:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan:

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PEJABAT STRUKTURAL	4	4	8
2	STAF /ASN	10	4	14
3	TENAGA TEKNIS / FUNGSIONAL		1	1
4	PENGAMANAN KANTOR / NON ASN	3		3
5	KEBERSIHAN DLHK / NON ASN	4		4
6	HONORER / NON ASN	7	5	12
	<b>JUMLAH</b>	28	14	<b>42</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jabatan didukung oleh 42 orang dengan rincian 8 orang sebagai pejabat struktural, 14 orang sebagai staf, 1 orang sebagai tenaga teknis/fungsional, 3 orang sebagai pengaman kantor, 4 orang sebagai petugas kebersihan DLHK / Non ASN dan 12 orang sebagai tenaga honorer/Non ASN orang sebagai tenaga honorer.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan:

**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1	1	2



2	GOLONGAN III	4	7	11
3	GOLONGAN II	9	1	10
4	GOLONGAN I			0
5	HONORER	14	5	19
	<b>JUMLAH</b>	28	14	42

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan golongan didukung oleh 42 orang dengan rincian 2 orang termasuk Golongan IV, 11 orang termasuk Golongan III, 10 orang termasuk Golongan II dan 19 orang termasuk honorer. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua golongan yang mendominasi dalam Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Golongan III dan golongan II masing-masing sejumlah 11 orang dan 10 orang.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PASCA SARJANA	2	2	4
2	SARJANA	3	2	5
3	DIPLOMA	1	3	4
4	SLTA	22	6	28
5	SLTP	1		1
6	SD			
	<b>JUMLAH</b>	29	13	42



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pendidikan didukung oleh 42 orang dengan rincian 4 orang lulusan Pasca Sarjana, 5 orang lulusan Sarjana, 4 orang lulusan Diploma, 28 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan SLTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo di dominasi oleh lulusan SLTA sejumlah 28 orang. Dengan mengacu pada kondisi dan daya dukung SDM tersebut diatas, Kecamatan Gedangan dapat secara maksimal memberikan pelayanan secara efektif dengan terus meningkatkan pola-pola update dan upgrade kemampuan kompetensi seiring dengan perkembangan era digitalisasi pelayanan yang akan mempermudah masyarakat pada umumnya. Kebutuhan akan peningkatan kompetensi berbasis IT / Digital telah direncanakan dalam program pengembangan SDM Kecamatan Gedangan seiring perkembangan teknologi dan Informasi.

Kondisi sarana prasarana yang ada di Kecamatan Gedangan sudah cukup memadai untuk mendukung operasional pelayanan dan menunjang tujuan kecamatan Gedangandalam memberikan pelayanan prima kepada warga. Proses peningkatan dan upgrade Infrastruktur terutama pelayanan berbasis Digital masih perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada perencanaan anggaran setiap tahun. Diharapkan dengan kondisi yang ada dan perencanaan pengembangan infrastruktur dan layanan berbasis digital dapat memberikan peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.



**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN JENIS BARANG	SATUAN	KETERANGAN
1.	Mobil Station Wagon	4 unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2	13 unit	Baik
3.	Lemari/Rak	28 unit	Baik
4.	Filling cabinet / brankas	16 unit	Baik
5.	CCTV	1Paket	Baik
6.	Alat Penghancur Kertas	1 buah	Baik
7.	Mesin Absensi	2 buah	Baik
8.	LCD Proyektor dan monitor	6 buah	Baik
9.	Mesin antrian	1 buah	Baik
10.	Papan Instansi dan pegumuman	11 buah	Baik
11.	Printer	24 buah	Baik
12.	Scanner	3 buah	Baik
13.	Meja Kerja	31 buah	Baik
14.	Kursi/bangku/sofa	100 buah	Baik
15.	AC/Kipas Angin	38 buah	Baik
16.	Televisi	4 buah	Baik
17.	Alat Pemadam/Portable	3 buah	Baik
18.	Personal komputer	15 buah	Baik
19.	laptop	14 set	Baik

### **2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN**

#### **2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Gedangan dilakukan oleh petugas atau aparatur kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu



dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai pemohon. Dalam mengukur kinerja, pada tahun 2020 Kecamatan memiliki 10 sasaran, yaitu:

1. Prosentase Penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai Standar Pelayanan
2. Prosentase Penerbitan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai Standar Pelayanan
3. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan
4. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan
5. Prosentase Penerbitan IMB rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m<sup>2</sup> yang sesuai Standar Pelayanan
6. Prosentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan
7. Prosentase jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti
8. Prosentase desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu
9. Prosentase desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu
10. Prosentase desa yang melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu.

Berdasarkan sasaran kinerja di atas, Kecamatan Gedangan mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Gedangan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020. Berikut adalah tabel tentang hasil analisis pencapaian kinerja layanan Kecamatan Gedangan dan tabel hasil analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Gedangan tahun 2016-2020:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

**Tabel 2.6**  
**Matrik Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Gedangan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	82	86	88	89	90	80	84	88	90	90	97	98	100	101	100
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	80	85	86	89	90	80	84	88	90	90	100	98	102	101	100
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

	non perum di bawah 20 m <sup>2</sup> yang sesuai Standar Pelayanan															
6	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	101	101	102
7	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	1296	1296	1330	1330	1330	1296	1296	1330	1340	1340	100	100	101	101	101
8	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	93	100	100	100	100
10	Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan Reviu pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun 2016 hingga 2020 dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah memenuhi target dimana realisasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada rasio kinerja dapat kita ketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah baik dan stabil setiap tahunnya. Bila dilihat setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

**1. Persentase Penerbitan KTP Yang Sesuai Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**2. Persentase Penerbitan KK Yang Sesuai Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**3. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Waris Yang Sesuai Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**4. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja Yang Sesuai Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar



Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**5. Persentase Penerbitan Imb (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perum Dibawah 200 M<sup>2</sup> Yang Sesuai Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m<sup>2</sup> yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m<sup>2</sup> yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengendalian pelayanan yang efektif.

**6. Persentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan Yang Sesuai Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Penerbitan legalitas dokumen ini menjadi sangat krusial dikarenakan saat pandemic / kondisi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan bantuan social dengan syarat kelengkapan dokumen. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**7. Presentase Koordinasi Dan Fasilitasi Di Bidang Pembangunan Dan Pemerintahan Yang Ditidaklanjuti**

Pada Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti sudah memenuhi target yang telah



ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**8. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun APBDes Tepat Waktu**

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**9. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun LPPD Tepat Waktu**

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**10. Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Musrenbang Desa Tepat Waktu**

Pada Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**11. Persentase Penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha ) sesuai dengan Standar Pelayanan**

Pada Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan SIUP/TDP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan yang dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam mensupport performance UKM dalam menghadapi pandemic Covid-19. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga



mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 kinerja pelayanan yang sedikit menurun dikarenakan perubahan kebijakan mengacu pada pengendalian protocol kesehatan (Prokes) dan meminimalkan tatap muka dalam pelayanan.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Penerbitan KTP , KK , Surat Pindah, Surat Keterangan Waris, Surat Perubahan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pencari Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 200 M2 dan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan;
2. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal,
5. Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan mutasi;
6. Kurangnya koordinasi internal;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa aktifitas pelayanan menjadi terhambat;
9. Pelayanan yang dilakukan secara online sering mengalami kendala;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan IT dalam penyelesaian permasalahan pelayanan secara online;



11. Kurangnya informasi dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan pelayanan secara online;
12. Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan dalam bidang Kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa;
3. Meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Mengoptimalkan kepatuhan Standar Pelayanan;
5. Menambah tenaga Aparatur Sipil Negara yang menangani Pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi internal;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara on line di masa pandemi Covid-19;
9. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian kendala jaringan online.
10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga IT di ruang pelayanan;
11. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Gedangan dan meningkatkan sosialisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Meningkatkan koordinasi dengan penuh tanggungjawab untuk mendorong terbentuknya desa-desa maju di wilayah Kecamatan Gedangan.

### **2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra



Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah / Perangkat Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja SKPD terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pengaturan mengenai



Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Adapun perkembangan anggaran dan realisasi Kecamatan Gedangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN**

**Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan  
Kabupaten Sidoarjo**

Uraian Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>																	
Penyediaan barang/jasa perkantoran	0	0	566,880,000	581,889,290,000	642,493,238	0	0	566,880,000	518,971,922,000	560,661,939,000	99,00	100,00	100,00	89,19	87,26	10%	95%
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	0	0	98,220,000,00	101,950,000,00	127,361,303,000	0	0	98,220,000,00	101,247,168,000	97,620,000,000	99,00	98,80	100,00	99,31	76,65	8%	85%
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	0	0	1,901,000,00	2,067,950,00	2,825,000,00	0	0	1,889,000,00	2,067,950,00	1,615,400,00	98,80	100,00	95,00	100,00	57,18	8,5%	80,5%
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	0	0	267,350,000,00	275,784,442,50	503,076,600,00	0	0	223,980,000,00	267,276,906,00	481,431,603,00	100,00	98,80	100,00	96,92	95,70	10%	98%
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	0	0	275,450,000,00	289,758,000,00	300,906,000,00	0	0	275,450,000,00	288,321,555,00	279,404,975,00	100,00	100,00	100,00	99,50	92,85	10%	98%
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	0	0	25,340,000,00	35,870,000,00	2,673,600,00	0	0	20,450,000,00	28,507,510,00	1,409,000,00	87,50	85,55	89,19	79,47	52,70	10%	65%
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	0	0	2,455,000,00	2,670,000,00	3,729,600,00	0	0	2,220,000,00	2,670,000,00	791,200,00	88,75	88,00	89,50	100,00	21,21	10%	56%
Penyusunan laporan keuangan	0	0	2,000,000,00	5,000,000,00	2,970,000,00	0	0	2,678,000,00	4,750,000,00	582,000,00	88,00	89,50	93,55	95,00	19,60	10%	45%
<b>Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan</b>																	
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	0	0	4,230,000,00	3,750,000,00	5,190,000,00	0	0	4,230,000,00	3,750,000,00	5,190,000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8%	100%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	18,350,000,00	27,213,000,00	2,325,000,00	0	0	18,350,000,00	27,150,000,00	2,075,000,00	-	100,00	100,00	99,77	89,25	12%	95%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	1,500,000,00	3,000,000,00	2,550,000,00	0	0	1,500,000,00	3,000,000,00	2,550,000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25%	100%
Koordinasi dan Kerjasama dengan	0	0	4,905,000,00	937,500,00	15,225,000,00	0	0	4,905,000,00	937,500,00	14,925,000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,03	10%	99%



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN GEDANGAN**

Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan																	
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	0	0	250,000.00	15,000,000.00	3,150,000.00	0	0	250,000.00	15,000,000.00	3,075,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.62	10%	95%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	0	0	250,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	0	0	250,000.00	3,000,000.00	2,550,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	0	0	6,050,000.00	8,500,000.00	255,000.00	0	0	6,050,000.00	8,456,690.00	240,000.00	99.05	99.00	95.00	99.49	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian	0	0	344,250,000	434,100.00	434,100.00	0	0	344,250,000	434,100.00	419,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.54	10%	98%
Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	0	0	50,000,000.00	88,111,780.00	8,793,224.00	0	0	50,000,000.00	88,019,380.00	5,927,000.00	100.00	100.00	100.00	99.90	67.40	10%	98%
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	0	0	11,110,000.00	24,464,400.00	5,295,000.00	0	0	11,110,000.00	24,443,400.00	5,295,000.00	100.00	100.00	100.00	99.91	100.00	10%	98%
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	0	0	2,225,000.00	2,622,000.00	2,780,000.00	0	0	2,225,000.00	2,622,000.00	2,580,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.81	10%	98%
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial	0	0	252,540,000.00	307,062,500.00	267,704,000.00	0	0	252,540,000.00	294,375,775.00	263,366,480.00	99.05	99.00	95.00	99.49	94.12	10%	98%
Pembinaan Lembaga, Kegiatan	0	0	4,234,500.00	8,196,000.00	149,955,200.00	0	0	4,234,500.00	8,175,000.00	147,361,184.00	95.00	99.49	94.12	95.87	98.27	10%	98%



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN GEDANGAN**

Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik																	
Pembinaan Perangkat Desa	0	0	8,678,900.00	12,067,000.00	20,620,000.00	0	0	8,678,900.00	12,025,000.00	19,595,000.00	99.74	95.03	99.74	99.74	95.03	10%	98%
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	0	0	45,098,000.00	88,267,500.00	27,625,000.00	0	0	45,098,000.00	84,812,500.00	25,975,000.00	99.74	95.03	99.74	99.65	94.03	10%	98%
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	3,123,000.00	3,750,000.00	111,154,900.00	0	0	3,000,050.00	3,750,000.00	87,460,715.00	95.00	99.49	95.00	96.09	78.68	10%	98%
<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum</b>																	
Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	0	0	97,185,000.00	41,075,300.00	41,075,300.00	0	0	92,137,250.00	41,075,300.00	38,804,000.00	95.03	99.74	94.83	100.00	94.47	15%	95%
Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum	0	0	34,945,000.00	0.00	0.00	0	0	31,292,250.00	0.00	0.00			89.55		-		



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.4.1. Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sasaran renstra kementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja Kecamatan Gedangan periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terhadap Sasaran Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	88,48	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Berkembangnya status pembangunan desa
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Gedangan Dilaksanakan Dengan Baik	100	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	
	Persentase Desa Maju di Kecamatan Gedangan	53,33		

Implikasi sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terhadap pelayanan Kecamatan Gedangan antara lain:

a) Tantangan:

1. Adanya persepsi negative desa terhadap indeks desa membangun. Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurang ADD



2. Masih terdapat warga Masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo namun belum mengurus surat keterangan pindah domisili (SKPWNI).
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen dan kevalidan data kependudukan masih rendah.

b) Peluang:

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan maupun administratif
2. Kepedulian desa akan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan telah cukup baik
3. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

#### **2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW**

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan hasil pencapaian pelayanan, analisa RTRW Kecamatan Gedangan dan KLHS Kecamatan Gedangan, maka tantangan dan peluang Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.9 Matrik Tantangan dan Peluang**

Tantangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan</li><li>2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup</li><li>3. Belum terib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat desa</li><li>4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes</li><li>5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang</li></ol>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya</li><li>2. Adanya perwujudan e-government</li><li>3. Diwujudkan pelayanannya yang mudah dalam aplikasi Online</li><li>4. Peningkatan Kompetensi SDM Kecamatan seiring dengan tuntutan media informasi pelayanan</li><li>5. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen terkait Standar Pelayanan secara Dokumentasi Online / Offline</li></ol>

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja Perangkat Daerah terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.



Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perludilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Tabel 2.10. Telaah Renstra RTRW

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah
1	SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru;	Zona industri Kecamatan Gedangan seluas 534,36 Ha	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman	1. Perijinan pembangunan industri 2. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan pemukiman pedesaan 3. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan pemukiman pedesaan 4. Koordinasi dalam pengembangan wilayah
2	Sistem Perkotaan: Hirarki perkotaan sedang dengan fungsi	Kawasan permukiman perdesaan Kecamatan	ketertiban umum	



	sebagai pemasok 2 kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis	Gedangan, seluas 12,77 Ha		kecamatan
3	Kawasan yang mempunyai prospek pengembangan tinggi dan mendapatkan prioritas pelayanan air bersih	Kawasan permukiman perkotaan Kecamatan Gedangan, seluas 1.511,72 Ha		5. Adanya Pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsilahan
4	Kawasan militer berada pada sebagian Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran, dan Sedati. Kawasan militer tidak diijinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan lain			

### 2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Pada Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo, pada Kecamatan Gedangan terdapat beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang terdapat di Kecamatan Gedangan, antara lain:

1. Wilayah kumuh akibat kepadatan dan pertumbuhan penduduk
2. Alih fungsi lahan sawah dan tambak menjadi pemukiman serta industri sehingga dapat menambah aspek kendali lingkungan yang lebih kompleks
3. Kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang meningkat tanpa pelebaran jalan

### 2.5. KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN RENSTRA -PD

Dinamika situasi dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu direspon dengan baik oleh perangkat daerah, oleh karena itu perubahan renstra merupakan hal yang seyogyanya dilaksanakan pada saat diperlukan.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN GEDANGAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai SKM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
2.			Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP
					Nilai RB	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat.	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN GEDANGAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
					Nilai IPP	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	Indeks penilaian sebagai berikut : a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Gedangan berfokus pada urusan pemerintahan yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja. Setelah Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021 - 2026.

Identifikasi permasalahan di Kantor Kecamatan Gedangan dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Gedangan serta dikolaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Kecamatan Gedangan. Permasalahan pelayanan adalah perbedaan / kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja Kecamatan Gedangan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seperti halnya instansi lainnya



uga memiliki permasalahan-permasalahan yang diharapkan ataupun tidak tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

No	Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	100	1. Kualitas dan 2. Kuantitas Sumber daya aparatur 3. Sarana dan prasarana 4. SOP pelayanan 5. Perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan 6. Sinergitas antar bidang 7. Administrasi perkantoran	1. Pemahaman masyarakat tentang syarat pelayanan umum 2. Administratif tingkat desa 3. Kedisiplinan penyusunan dokumen desa 4. Kualitas sumberdaya aparatur desa	1. Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima 2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan 3. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum 5. Perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal 6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah 7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan 8. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa 9. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes 10. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	100			
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	100			
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	100			
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m <sup>2</sup> yang sesuai Standar Pelayanan	100			
6	Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
7	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
8	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	12330			
9	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100			



Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Program Kecamatan Gedangan disusun melalui Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra Organisasi Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi penerapan program di Kecamatan Gedangan diidentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kompetensi dan Jumlah SDM	Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima	1. Kebijakan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang kompleks 2. Belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi serta belum dipahami dan dilaksanakannya penyusunan kebutuhan SDM secara tepat.
		Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan



		kecamatan	terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan
		Belum optimalnya penerapan standar pelayanan	2. Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana. 4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan 5. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.
2.	Hubungan antar lembaga	Belum tertib dan lemahnya pemahaman administrasi perkantoran tingkat Desa	6. Masih rendahnya pemahaman pwerangkat Desa mengenai akuntabilitas laporan dan administrasi Desa 7. Belum maksimalnya sosialisasi informasi pelayanan di era Digital kepada Masyarakat
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum	8. Belum optimalnya penggunaan perangkat dan infrastruktur di Desa dalam penyajian informasi & pelayanan kepada Masyarakat

Dari identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut di atas, Kecamatan Gedangan membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja sesuai dengan aspek permasalahan dan telaah akar masalah. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dari Renja Organisasi Pemerintah Daerah terbit DPA Organisasi Pemerintah Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

### 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan tahun 2016-2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang



dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di *breakdown* ke dalam tiap misi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan diantaranya adalah Kecamatan Gedangan. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memberikan pedoman bagi Kecamatan Gedangan dalam menyusun Renstra Kecamatan Gedangan. Berdasarkan visi misi dan isu strategis yang ada maka ditetapkan Tujuan dari masing-masing misi yang diukur dengan indikator. Kelima misi tersebut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;



4. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Dari 5 (lima) misi RPJMD, ada 2 misi yang harus di jadikan acuan oleh kecamatan Gedangan yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-5. Ini menjadi pendorong untuk Kecamatan Gedangan untuk pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**

Visi :			
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha  2. Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan yang belum sesuai Standar Pelayanan;</li> <li>- Kurangnya pemahaman mengenai Standar Pelayanan;</li> <li>- Kurangnya komitmen dalam mematuhi Standar Pelayanan;</li> <li>- Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal;</li> <li>- Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia;</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana;</li> <li>- Adanya pandemi Covid-19 membuat aktifitas pelayanan terhambat;</li> <li>- Pelayanan secara online sering mengalami kendala;</li> <li>- Kurangnya kemampuan IT pelayanan secara online;</li> <li>- Kurangnya informasi masyarakat dalam pelayanan online.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada;</li> <li>2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan;</li> <li>2. Tersedianya dukungan APBD.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya inventarisir informasi terdokumentasi terkait permasalahan ketertiban umum di wilayah kecamatan</li> <li>- Kurangnya keterbukaan informasi yang didapat oleh Perangkat Daerah terutama permasalahan ketertiban umum secara tepat dan cepat</li> </ul>	Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi penghambat ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan pemerintah pusat mengenai pengukuran dan pencapaian tujuan pelayanan ketertiban umum</li> <li>2. Adanya dukungan kekeluargaan antar instansi pemerintah dan stakeholder yang sangat baik.</li> </ol>

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam faktor penghambat dan faktor pendorong. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan





yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Penjabaran faktor penghambat dan faktor pendorong pada Misi tersebut secara substansial memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di level pemerintah daerah maupun Kecamatan Gedangan.

Kecamatan Gedangan memiliki beberapa penghambat / permasalahan untuk bisa mencapai Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Disamping itu, Kecamatan Gedangan juga memiliki faktor pendorong untuk mengatasi penghambat / permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya faktor pendorong yang mampu mengatasi faktor penghambat maka diharapkan Kecamatan Gedangan mampu untuk mewujudkan misi tersebut.

### 3.3 TELAAH RENSTRA KABUPATEN SIDOARJO

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni "*Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani*". Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra Organisasi Pemerintah Daerah dan menjabarkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Startegi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang



bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah



dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### 3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.



Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Gedangan yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yaitu menunjukkan bahwa Kecamatan Gedangan merupakan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dalam hierarki atau besaran perkotaan termasuk perkotaan sedang. Secara perwilayahan Kecamatan Gedangan termasuk ke dalam SSWP 1 yaitu dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, dikembangkan fasilitas transportasi, mall, bandar udara dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional. Kecamatan Gedangan masuk pada rencana pengembangan wilayah prioritas yang meniadakan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih). Kondisi saat ini Kecamatan Gedangan memiliki zona industri seluas 534,36 Ha dan kawasan permukiman seluas 12,77 Ha serta kawasan permukiman perkotaan seluas 1,511,72 Ha. Kecamatan Gedangan termasuk juga kawasan Militer yang terdiri dari Kawasan Tangsi Militer, Kawasan Latihan Militer, dan Kawasan Penyimpanan Mesiu/Amunisi

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan Gedangan, Akademisi, dan stake holder terkait.
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.



- 2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut.

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Pembobotan**

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Berdasarkan pada penelaahan identifikasi masalah, visi misi kepala daerah dan RTRW, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Kecamatan Gedangan antara lain:

a. Kekuatan

1. Adanya pendanaan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. Keberadaan kecamatan semakin kuat seiring dengan diterbitkannya regulasi baru Perbup Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 mengenai tupoksi kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
3. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati ke Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

b. Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal
2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan



3. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam administrasi barang
  4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal
  5. Perencanaan & Pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal
  6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah
  7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan
  8. Kualitas perfoma nilai SKM Kecamatan
  9. Berapa Desa menuju Mandiri
  10. Proses penyusunan dokumen perencanaan, laporan, penyusunan APBDes
- c. Peluang
1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya
  2. Adanya pewujudan *e-government*
- d. Ancaman
1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan
  2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup
  3. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa
  4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD dan MusrenbangDes
  5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
  6. Belum berakhirnya masa pandemi dan kurang disiplin penerapan protokol kesehatan



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inofatif. Adapun Visi yang mengacu pada Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :

***”Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”.***

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;

MISI 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;

MISI 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;

MISI 4: Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;

MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga





Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan, penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan Publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mendukung terselenggaranya Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha”*, Kecamatan Gedangan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum”*.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan**

Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET KINERJA TUJUAN						Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN					
		PADA TAHUN								PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.1 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.2 (Sangat Baik)	89.3 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)	89.5 (Sangat Baik)	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)
									Nilai RB	N/A	27.22	28	29	30	31
									Nilai IPP	N/A	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)

Untuk mendukung terselenggaranya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “*Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital*” dan “*Terselenggaranya*



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

*Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha*” maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Kecamatan Gedangan



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN GEDANGAN**

Strategi Pembangunan Renstra Kecamatan Gedangan tahun 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan.

Strategi pembangunan adalah cara/pendekatan/kebijakan/tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode Renstra. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi, yang menggambarkan mengenai cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan.

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;



g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;

h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

Strategi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Gedangan selama periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang pada Matrik Renstra 2016 - 2021 pada lampiran 1.

Kebijakan Kecamatan Gedangan untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat;
4. Mengembangkan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan**  
**Tahun 2021-2026**

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
<b>MISI I</b> : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha				
<b>MISI 5</b> : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	a.Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b.Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c.Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d.Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan; e.Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; f.Memberikan sarana dan prasarana yang memadai; g.Meningkatkan partisipatif masyarakat	1.Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2.Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif 3.Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Penjelasan urutan dari Visi, Misi, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Program masing-masing bagian terkait di Kecamatan Gedangan dijelaskan dalam tata urutan dan korelasi pada Matrik Renstra Kecamatan Gedangan yang terlampir pada Lampiran.1

## 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGAN

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan pada Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan



Kegiatan Kecamatan Gedangan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi Kecamatan Gedangan. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Gedangan ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gedangan dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

**3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Pelaksanaan program terkait Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.



#### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Pelaksanaan program terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka langkah operasional dan pengendalian di Kecamatan Gedangan telah dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi Perangkat Daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi bagian dan seksi di Kecamatan Gedangan dalam tugas pokoknya, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan kegiatan didalam renstra dapat dilihat di dalam table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Misi Bupati	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Keterangan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	1B	1B	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase sdn yang menjadi kewenangan kecamatan yang diberikan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang	a.100% b.90% c.100%	a.100% b.80% c.100%	1.351,043,903	a.100% b.80% c.100%	645,504,326	a.100% b.85% c.100%	554,707,750	a.100% b.90% c.100%	1.046,876,102	a.100% b.90% c.100%	1.811,963,712	a.100% b.95% c.100%	1.990,720,064	a.100% b.95% c.100%	2.114,773,253	Kecamatan Gedangan	Camat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang lebih Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	9000 Berkas	9600 Berkas	39,427,700	9600 Berkas	52,880,030	9600 Berkas	134,237,500	9600 Berkas	147,861,250	10000 Berkas	162,427,375	12000 Berkas	178,670,113	12000 Berkas	196,537,124	Kecamatan Gedangan	Keuabg Urum dan Kepagawian
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a.9600 Berkas b.50 Orang	a.9600 Berkas b.50 Orang	39,427,700	a.9600 Berkas b.50 Orang	52,880,030	0	a.9600 Berkas b.100 Orang	0	a.10000 Berkas b.100 Orang	0	a.12000 Berkas b.100 Orang	0	a.12000 Berkas b.100 Orang	0	0	Kecamatan Gedangan	Keuabg Urum dan Kepagawian
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A			1 Laporan	134,237,500	1 Laporan	147,861,250	1 Laporan	162,427,375	1 Laporan	178,670,113	1 Laporan	196,537,124	Kecamatan Gedangan	Keuabg Urum dan Kepagawian		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang	8 Laporan	8 Laporan	215,088,100	8 Laporan	430,062,500	8 Laporan	197,337,500	8 Laporan	217,071,250	8 Laporan	238,778,375	8 Laporan	262,656,213	8 Laporan	288,921,834	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesoc d. Kasi Pembangunan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	215,088,100	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	430,062,500	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesoc d. Kasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A			4 Laporan	197,337,500	4 Laporan	217,071,250	4 Laporan	238,778,375	4 Laporan	262,656,213	4 Laporan	288,921,834	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesoc d. Kasi Pembangunan			



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Dupai	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 bertal luas maksimal 400m <sup>2</sup> yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil money bidang kesehatan sosial, agama dan masyarakat, agama dan masyarakat, pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.896.528,103	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	362.561,796	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	223.132,780	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.262.143,602	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.410.357,962	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.551.363,750	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.629.314,295	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 bertal luas maksimal 400m <sup>2</sup> yang diterbitkan	75 berkas	75 berkas	2.903,179	75 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan	
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A				1 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	a. Jumlah money bidang kesehatan sosial, agama dan masyarakat; b. Jumlah money bidang pembangunan dan lingkungan; c. Jumlah money bidang pemerintahan d. Jumlah money bidang perekonomian Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	1.500,000	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Keace d. Kasi Pembangunan	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	N/A				4 Laporan	75.500,000	4 Laporan	83.050,000	4 Laporan	91.355,000	4 Laporan	100.480,500	4 Laporan	100.480,500	4 Laporan	33.320,711	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	a. Jumlah kegiatan pembinaan bidang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	1.662.124,908	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	362.561,796	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Perekonomian b. Kasi Pembangunan c. Kasi Perikanan	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	N/A				2 Laporan	147.632,780	2 Laporan	1.199.093,802	2 Laporan	1.319.002,962	2 Laporan	1.450.963,259	2 Laporan	1.450.963,259	2 Laporan	1.596.963,584	Kecamatan Gedangan	Kasi Perekonomian
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100.325,366	100%	59.077,009	100%	387.810,500	100%	426.591,550	100%	469.250,706	100%	516.175,776	100%	567.793,353	Kecamatan Gedangan	Kasi Transit	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemusatan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.325,366	2 Kegiatan	59.077,000	1 Kegiatan	387.810,500	1 Kegiatan	426.591,550	1 Kegiatan	469.250,706	1 Kegiatan	516.175,776	1 Kegiatan	567.793,353	Kecamatan Gedangan	Kasi Transit	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pergarnatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	a. 2 Kegiatan	a. 2 Kegiatan	100,325,368	a. 2 Kegiatan	59,077,008	a. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
		b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	b. 1 Kegiatan	b. 1 Kegiatan		b. 1 Kegiatan		b. 1 Kegiatan		b. 1 Kegiatan		b. 1 Kegiatan		b. 1 Kegiatan		b. 1 Kegiatan		Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pergarnatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	NIA				100 Orang	86,810,500	100 Orang	95,491,550	100 Orang	105,040,705	100 Orang	115,544,776	100 Orang	127,099,253	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	NIA				1 Dokumen	150,500,000	1 Dokumen	165,550,000	1 Dokumen	182,105,000	1 Dokumen	200,315,500	1 Dokumen	220,347,050	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
			Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	15 Desa	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	NIA				3 Lembaga Masyarakat	150,500,000	3 Lembaga Masyarakat	165,550,000	3 Lembaga Masyarakat	182,105,000	3 Lembaga Masyarakat	200,315,500	3 Lembaga Masyarakat	220,347,050	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
			Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	100%	100%	26,613,300	100%	41,690,000	100%	540,300,000	100%	594,330,000	100%	653,763,000	100%	719,139,300	100%	791,053,230	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
			fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	26,613,300	15 Desa	41,690,000	15 Desa	540,300,000	15 Desa	594,330,000	15 Desa	653,763,000	15 Desa	719,139,300	15 Desa	791,053,230	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
			fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. 15 desa b. 15 Desa	a. 15 desa b. 15 Desa	8,810,400	a. 15 desa b. 15 Desa	20,825,000	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NIA					2 Dokumen	233,300,000	2 Dokumen	256,630,000	2 Dokumen	282,293,000	2 Dokumen	310,522,300	2 Dokumen	341,574,530	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	17,802,900	15 Kegiatan	20,825,000	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	N/A					4 Dokumen	153,500,000	4 Dokumen	168,850,000	4 Dokumen	185,735,000	4 Dokumen	204,306,500	4 Dokumen	224,739,350	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A Dokumen	N/A Dokumen		N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A					4 Dokumen	153,500,000	4 Dokumen	168,850,000	4 Dokumen	185,735,000	4 Dokumen	204,306,500	4 Dokumen	224,739,350	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Program Pemungutan Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pemrakor perangkat daerah terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	4,909,220,779	100%	5,216,537,969	100%	6,412,762,618	100%	17,018,354,778	100%	18,720,190,257	100%	20,592,206,282	100%	22,851,430,211	Kecamatan Gedangan	Sekretariat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah beban perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	51,273,418	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	33,860,000	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	N/A					1. 5 Dokumen	54,150,000	1. 5 Dokumen	59,565,000	1. 5 Dokumen	65,521,500	1. 5 Dokumen	72,073,650	1. 5 Dokumen	79,281,015	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,300,000	1 Dokumen	3,630,000	1 Dokumen	3,993,000	1 Dokumen	4,392,300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan DIPA-SKPD	Jumlah dokumen DIPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah Dokumen DIPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,300,000	1 Dokumen	3,630,000	1 Dokumen	3,993,000	1 Dokumen	4,392,300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DIPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DIPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Intermediate output) / Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,300,000	1 Dokumen	3,630,000	1 Dokumen	3,960,000	1 Dokumen	4,302,300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	616,785	2 dokumen	3,320,000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A			2 Laporan	41,910,000	2 Laporan	46,101,000	2 Laporan	50,711,100	2 Laporan	55,782,210	2 Laporan	61,360,431	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen moranv PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	656,633	4 Dokumen	30,540,000	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A			4 Laporan	3,240,000	4 Laporan	3,564,000	4 Laporan	3,920,400	4 Laporan	4,312,440	4 Laporan	4,743,684	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembekalan realisasi anggaran PD	90%	90%	3,630,528,362	90%	3,265,794,237	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Pembekalan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A			90%	3,740,573,650	90%	4,114,631,015	90%	4,526,094,117	90%	4,978,703,528	90%	5,476,573,881	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25 Orang	25 Orang	3,629,470,967	25 Orang	3,262,534,237	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A			25 Orang/bulan	3,659,393,650	25 Orang/bulan	4,025,333,015	25 Orang/bulan	4,427,866,317	25 Orang/bulan	4,870,652,948	25 Orang/bulan	5,357,718,243	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	100 SPM	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A			1 Laporan	75,500,000	1 Laporan	83,050,000	1 Laporan	91,395,000	1 Laporan	100,490,500	1 Laporan	110,539,550	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/PD yang tersusun	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	1,667,395	12 Laporan	3,280,000	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A			1 Paket	7,557,000	1 Paket	8,312,700	1 Paket	9,143,970	1 Paket	10,056,367	1 Paket	11,064,204	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3,182,820	3 Jenis	3,980,000	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A			3 Dokumen	2,700,000	3 Dokumen	2,970,000	3 Dokumen	3,267,000	3 Dokumen	3,593,700	3 Dokumen	3,953,070	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A			Paket	0	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Facilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jemaah rapat/tamu yang disediakan b. Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	39,052,960	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	65,225,000	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A			4 Laporan	135,495,000	4 Laporan	149,044,500	4 Laporan	163,948,950	4 Laporan	180,343,845	4 Laporan	198,378,230	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase surat perintah tugas yang diindaklanjuti	100%	100%	75,399,611	100%	122,411,573	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A			2 Laporan	177,800,000	2 Laporan	195,580,000	2 Laporan	215,138,000	2 Laporan	236,651,800	2 Laporan	260,316,980	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	65 Buah	65 Buah	0	65 Buah	267,434,873	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah BMD yang diadakan	N/A			108 Jenis	1,576,760,430	108 Jenis	9,470,987,271	108 Jenis	10,418,085,990	108 Jenis	11,459,894,508	108 Jenis	12,605,894,059	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A			1 Unit	0	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A			2 Unit	88,800,000	2 Unit	97,680,000	2 Unit	107,448,000	2 Unit	118,192,800	2 Unit	130,012,080	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A			1 Unit	0	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelur yang diadakan	23 Buah	23 Buah	0	100 Buah	40,495,220	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A			107 Unit	540,161,520	107 Unit	594,177,672	107 Unit	653,595,439	107 Unit	718,954,983	107 Unit	790,850,481	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	70 Buah	70 Buah	0	10 Buah	246,939,653	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasabg Ummam dan Kepegawaian				





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		Jumlah Unit Peralatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	N/A			59 Unit	760,994,910	59 Unit	837,094,401	59 Unit	920,803,841	59 Unit	1,012,884,225	59 Unit	1,114,172,645	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Gedung	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1 Unit	186,813,000	1 Unit	7,942,035,196	1 Unit	8,736,238,719	1 Unit	9,609,862,590	1 Unit	10,570,848,850	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase persentasinya jasa penunjang pemerintahan	90%	90%	812,790,200	90%	841,849,343	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Persentase persentasinya jasa penunjang administrasi pemerintahan	N/A					90%	1,220,796,000	90%	1,342,875,600	90%	1,477,163,160	90%	1,624,879,476	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1700 Surat	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A			1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Raketing listrik, air, telepon dan internet yang dibayar	12 bulan	12 bulan	119,600,000	12 bulan	155,400,743	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A			12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	176,000,000	12 Laporan	193,600,000	12 Laporan	212,960,000	12 Laporan	234,256,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang bersedia	90%	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A			1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar 3. Jumlah pengelola kearsyafan dan barang yang dibayar	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	693,190,200	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	696,440,200	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A			12 Laporan	1,060,796,000	12 Laporan	1,166,875,600	12 Laporan	1,283,563,160	12 Laporan	1,411,919,476	12 Laporan	1,553,111,424	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	80 Unit	80 Unit	104,104,619	80 Unit	255,000,000	80 Unit	0	80 Unit	0	80 Unit	0	80 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah yang layak fungsi	N/A					80%	798,125,000	80%	877,937,500	80%	965,731,250	80%	1,062,304,375	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara 2. Jumlah bahan pemeliharaan dan bahan pembawa kendaraan yang bersedia 3. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajalnya	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	0	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajalnya	N/A			16 Unit	0	16 Unit	0	16 Unit	0	16 Unit	0	16 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	18 Perawatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1. 16 unit	1. 16 unit	40,104,619	1. 16 unit	35,000,000	1. 16 unit	0	1. 16 unit	0	1. 16 unit	0	1. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		2. Jumlah bahan peralihan dan bahan pembarah kendaraan yang tersedia	2. - buah	2. - buah			2. - buah		2. - buah		2. - buah		2. - buah		2. - buah		Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3. 16 unit	3. 16 unit			3. 16 unit		3. 16 unit		3. 16 unit		3. 16 unit		3. 16 unit		Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Perawatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A				16 Unit	122,500,000	16 Unit	134,750,000	16 Unit	148,225,000	16 Unit	163,047,500	16 Unit	179,352,250	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara	a. N/A Unit	a. N/A Unit	0	a. N/A Unit	0	a. 1 Unit	0	a. 1 Unit	0	a. 1 Unit	0	a. 1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		b. Jumlah Alat Besar yang dikurs perizinannya	b. N/A Unit	b. N/A Unit			b. N/A Unit		b. 1 Unit		b. 1 Unit		b. 1 Unit		b. 1 Unit		Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Perawatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	N/A Unit				1 Unit	0	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara	a. N/A Unit	a. N/A Unit	0	a. 1 Unit	0	a. 1 Unit	0	a. 1 Unit	0	a. 1 Unit	0	a. NA	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dikurs perizinannya	b. N/A Unit	b. N/A Unit			b. 1 Unit		b. 1 Unit		b. 1 Unit		b. 1 Unit		b. NA	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelur yang dipelihara	50 buah	50 buah	5,000,000	50 buah	5,000,000	100 buah	0	150 buah	0	200 buah	0	300 buah	0	400 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A				34 Unit	40,000,000	34 Unit	44,000,000	34 Unit	48,400,000	34 Unit	53,240,000	34 Unit	58,564,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 buah	13 buah	0	13 buah	85,000,000	25 buah	0	25 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	N/A				11 Unit	310,000,000	11 Unit	341,000,000	11 Unit	375,100,000	11 Unit	412,610,000	11 Unit	453,671,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah base gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	120 M2	120 M2	59,000,000	120 M2	130,000,000	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A				1 Unit	325,625,000	1 Unit	358,187,500	1 Unit	394,006,250	1 Unit	433,406,875	1 Unit	476,747,563	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin	a. 100%	a. 100%	0	a. 100%	0	a. 100%	24,750,000	a. 100%	55,000,000	a. 100%	80,500,000	a. 100%	86,350,000	a. 100%	73,205,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	b. 80%	b. 80%		b. 80%		b. 80%		b. 80%		b. 80%		b. 80%		b. 80%		Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	26 Stal	26 Stal	0	26 Stal	0	26 Stal	0	26 Stal	0	26 Stal	0	26 Stal	0	26 Stal	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	N/A				1 Paket	24,750,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	80,500,000	1 Paket	86,550,000	1 Paket	73,205,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang				75 Orang	0	75 Orang	-	75 Orang	-	75 Orang	-	75 Orang	-	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Berketahanan dan Berkeadilan	Program Koordinasi Ketahanan dan Keterlibatan Umum	Penerbasa pelatngan Penda dan Perkaca yang dilngani	100%	100%	339,948,897	100%	327,379,000	100%	720,879,000	100%	793,076,900	100%	872,384,590	100%	959,623,049	100%	1,055,585,354	Kecamatan Gedangan	a. Kasl Tambih b. Kasl Keras



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2020)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				20	21	22	23	24	25	26	26								
Misi 1: Berprestasi Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketertiban dan ketenteraman dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	330,948,897	4 Laporan	327,379,000	4 Laporan	567,479,000	4 Laporan	624,226,900	4 Laporan	686,649,590	4 Laporan	755,314,549	4 Laporan	830,846,004	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib. b. Kasi Kasos
	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketertiban dan ketenteraman yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	237,516,700	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	215,454,000	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A				4 Laporan	340,254,000	4 Laporan	374,279,400	4 Laporan	411,707,340	4 Laporan	452,678,074	4 Laporan	498,165,881	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang telah dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	102,432,197	3 Kegiatan	111,925,000	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Kasos
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A				3 Laporan	227,225,000	3 Laporan	249,947,500	3 Laporan	274,942,250	3 Laporan	302,436,475	3 Laporan	332,680,125	Kecamatan Gedangan	Kasi Kasos	
	Koordinasi Penegapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	4 permasalahan	4 permasalahan	0	4 permasalahan	0	4 permasalahan	153,500,000	4 permasalahan	168,850,000	4 permasalahan	185,735,000	4 permasalahan	204,308,500	4 permasalahan	224,739,350	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Efektivitas Anggaran	Koordinasi/Sinergis Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi pemantauan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar c. Jumlah mosur bidang	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
	Koordinasi/Sinergis Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A				4 Laporan	153,500,000	4 Laporan	168,850,000	4 Laporan	185,735,000	4 Laporan	204,308,500	4 Laporan	224,739,350	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pemabngunan Jangka Menengah atau Rencana Startegis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinaergi dengan fungsi tugas dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan KemudahanBerusaha”.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Sasaran Misi 1 pada RPJMD: Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha									Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Peanggung jawab	Sumber Data
Sasaran Misi 5 pada RPJMD Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram												
Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target capaian kinerja						Kondisi Kinerja Akhir				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026			
<b>Sasaran I:</b> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum												
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
<b>Sasaran II:</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan												
Nilai SAKIP	70,9 (BB)	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)	80.4 (A)	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut: 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN

									Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30		
Nilai RB	N/A	N/A	27.22	28	29	30	31	31	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat.	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB
Nilai IPP	N/A	N/A	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP

Kecamatan



## BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2026, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Gedangan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Gedangan ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Gedangan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Sidoarjo, 31 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN GEDANGAN



*[Handwritten Signature]*

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I  
NIP. 19770924 199701 2001



## LAMPIRAN

1. Matriks Reviu Renstra 2021-2026
2. Form E.73
3. Form E.80
4. SOP Mekanisme Reviu Renstra 2021-2026

Kecamatan Gedangan





Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Saasaran PO	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan)	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Rendita Kinerja pada akhir periode Rencana Peringkat Daerah (2026)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Saasran PO	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/Regulasi/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate output) / Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kurangta Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Rendisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2026)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000







Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo  
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis (IKU)	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	Nilai	89.1	95.75
		Nilai SAKIP	Nilai	80	77.56
		Nilai IPP	Nilai	4.51	4.16
		Nilai RB	Nilai	27.22	33.99
		Prosentase Serapan Anggaran	%	90	93.45
2	Meningkatnya ketentraman dan	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	76%	100%

No.	Sasaran	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan Gedangan		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	Rp 0,00,00	88.48	Rp 4.776.461.385,60,00	100	Rp 5.480.360.792,00,00	0	Rp 993.248.076,00,00	95,88	Rp 1.441.390.751,00,00	0	Rp 1.300.490.548,00,00	4,12	Rp 1.292.683.022,00,00	100	Rp 5.027.812.397,00,00	100%	91%	188.48	Rp 9.804.273.782,60,00	100%	0%	Kecamatan Gedangan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Tahapan Rekomendasi	2	Rp 0,00,00	2	Rp 50.076.600,00,00	2	Rp 35.990.000,00,00	1	Rp 287.600,00,00	1	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	2	Rp 287.600,00,00	100%	0%	4	Rp 4.776.748.985,60,00	100%	0%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	Rp 616.785,00,00	0	Rp 531.800,00,00	2	Rp 3.320.000,00,00	2	Rp 135.000,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	2	Rp 135.000,00,00	100%	4%	2	Rp 4.776.596.385,60,00	0%	774434%	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Dokumen		Rp 656.633,00,00	0	Rp 594.800,00,00	4	Rp 32.670.000,00,00	1	Rp 152.600,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	4	Rp 152.600,00,00	100%	0%	4	Rp 4.776.613.985,60,00	0%	727440%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Persen	90	Rp 0,00,00	95.93	Rp 3.223.852.996,00,00	90	Rp 3.552.877.410,00,00	0	Rp 450.025.199,00,00	50	Rp 0,00,00	20	Rp 0,00,00	20	Rp 0,00,00	90	Rp 450.025.199,00,00	100%	12%	185.93	Rp 5.226.486.584,60,00	100%	0%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	25	Rp 3.456.128.500,00,00	0	Rp 3.222.265.996,00,00	25	Rp 3.549.617.410,00,00	25	Rp 447.525.199,00,00	25	Rp 0,00,00	25	Rp 0,00,00	25	Rp 0,00,00	25	Rp 447.525.199,00,00	100%	12%	25	Rp 5.223.986.584,60,00	100%	151%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	Laporan	12	Rp 1.647.395,00,00	0	Rp 1.587.000,00,00	12	Rp 3.260.000,00,00	3	Rp 2.500.000,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 2.500.000,00,00	25%	76%	3	Rp 4.778.961.385,60,00	25%	290092%	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD PD yang telah teregistrasi Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	Persen Persen	90 90	Rp 0,00,00 0	0 0	Rp 5.709.000,00,00 0	90 90	Rp 4.664.000,00,00 0	25 0	Rp 0,00,00 0	25 0	Rp 0,00,00 0	20 0	Rp 0,00,00 0	20 0	Rp 0,00,00 0	90 0	Rp 0,00,00 0	100% 0%	0% 0%	90 0	Rp 4.776.461.385,60,00 0	100% 0%	0% 0%	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	Laporan	3	Rp 5.907.405,00,00	4	Rp 5.709.000,00,00	3	Rp 4.664.000,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	100%	0%	7	Rp 4.776.461.385,60,00	100%	80855%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	Persen	90	Rp 0,00,00	0	Rp 328.669.780,00,00	90	Rp 517.087.089,00,00	25	Rp 125.466.800,00,00	25	Rp 0,00,00	20	Rp 0,00,00	20	Rp 0,00,00	90	Rp 125.466.800,00,00	100%	24%	90	Rp 4.901.928.185,60,00	100%	0%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan yang tersedia	buah	52	Rp 4.145.937,00,00	0	Rp 4.015.000,00,00	385	Rp 12.839.950,00,00	210	Rp 7.721.050,00,00	0	Rp 0,00,00	175	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	385	Rp 7.721.050,00,00	100%	60%	385	Rp 4.784.182.435,60,00	100%	115394%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	buah	645	Rp 48.898.809,00,00	0	Rp 45.572.100,00,00	4923	Rp 164.287.280,00,00	1244	Rp 45.931.750,00,00	79	Rp 0,00,00	2056	Rp 0,00,00	1544	Rp 0,00,00	4923	Rp 45.931.750,00,00	100%	27%	4923	Rp 4.822.393.135,60,00	100%	9861%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	Orang/bulan Liter	8	Rp 132.000.000,00,00	0	Rp 116.736.980,00,00	8	Rp 133.800.000,00,00	8	Rp 29.600.000,00,00	8	Rp 0,00,00	8	Rp 0,00,00	8	Rp 0,00,00	8	Rp 29.600.000,00,00	100%	22%	8	Rp 4.806.061.385,60,00	100%	3640%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Buah	600	Rp 2.481.263,00,00	0	Rp 2.263.700,00,00	4104	Rp 8.550.000,00,00	0	Rp 0,00,00	1500	Rp 0,00,00	120	Rp 0,00,00	1620	Rp 0,00,00	3240	Rp 0,00,00	78%	0%	3240	Rp 4.776.461.385,60,00	100%	192501%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis	3	Rp 3.182.820,00,00	0	Rp 2.520.000,00,00	3	Rp 4.260.000,00,00	3	Rp 630.000,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 630.000,00,00	100%	14%	3	Rp 4.777.091.385,60,00	100%	150089%	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kotak Orang	1624 1624	Rp 39.092.960,00,00 0	0 0	Rp 38.912.000,00,00 0	900 900	Rp 65.975.000,00,00 0	450 450	Rp 17.287.500,00,00 0	300 300	Rp 0,00,00 0	390 390	Rp 0,00,00 0	0 0	Rp 0,00,00 0	1140 1140	Rp 17.287.500,00,00 0	100% 100%	26% 70%	1140 1140	Rp 4.793.748.885,60,00 0	70% 70%	12262%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	persen	100	Rp 118.668.876,00,00	0	Rp 118.650.000,00,00	100	Rp 127.374.859,00,00	25	Rp 24.296.500,00,00	25	Rp 0,00,00	25	Rp 0,00,00	25	Rp 0,00,00	100	Rp 24.296.500,00,00	100%	19%	100	Rp 4.800.757.885,60,00	100%	4045%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	buah	65	Rp 0,00,00	0	Rp 150.726.000,00,00	65	Rp 223.652.350,00,00	59	Rp 242.477.000,00,00	6	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	65	Rp 242.477.000,00,00	100%	108%	65	Rp 5.018.938.385,60,00	100%	0%	
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	buah		Rp 23.885.930,00,00	0	Rp 23.485.000,00,00	38	Rp 36.677.700,00,00	38	Rp 39.523.000,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	38	Rp 39.523.000,00,00	100%	107%	38	Rp 4.815.984.385,60,00	0%	20162%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Buah		Rp 130.357.691,00,00	0	Rp 127.241.000,00,00	21	Rp 186.974.650,00,00	21	Rp 202.954.000,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	21	Rp 202.954.000,00,00	100%	108%	21	Rp 4.979.415.385,60,00	0%	3819%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Persen	90	Rp 0,00,00	0	Rp 772.947.958,60,00	90	Rp 881.089.943,00,00	20	Rp 146.569.734,00,00	25	Rp 0,00,00	20	Rp 0,00,00	25	Rp 0,00,00	90	Rp 146.569.734,00,00	100%	16%	90	Rp 4.923.031.119,60,00	100%	0%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	Rp 116.600.000,00,00	0	Rp 113.029.314,00,00	12	Rp 127.400.743,00,00	3	Rp 28.196.020,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 0,00,00	3	Rp 28.196.020,00,00	25%	22%	3	Rp 4.804.657.405,60,00	25%	4120%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan barang yang terbayar Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang terbayar Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayar Jumlah Tenaga Non ASN yang terbayar	Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan		Rp 683.665.200,00,00	0	Rp 659.918.644,60,00	168	Rp 753.689.200,00,00	168	Rp 118.373.714,00,00	168	Rp 0,00,00	168	Rp 0,00,00	168	Rp 0,00,00	168	Rp 118.373.714,00,00	100%	15%	168	Rp 4.894.835.099,60,00	0%	715%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	Rp 0,00,00	0	Rp 244.479.051,00,00	60	Rp 265.000.000,00,00	15	Rp 28.421.743,00,00	15	Rp 0,00,00	15	Rp 0,00,00	15	Rp 0,00,00	60	Rp 28.421.743,00,00	100%	10%	60	Rp 4.804.883.128,60,00	100%	0%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	buah Unit		Rp 40.104.619,00,00	0	Rp 38.582.600,00,00	0	Rp 35.000.000,00,00	0	Rp 5.342.943,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 5.342.943,00,00	0%	15%	0	Rp 4.781.804.328,60,00	0%	11923%	
						16		0		16		4		4		4		16		16		100%		16		100%		

				Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Unit	16	0	16	4	4	4	4	16	100%	16	100%			
				Jumlah mebeleur yang dipelihara	buah	300	Rp 5.000.000,00	0 Rp 5.000.000,00	5 Rp 5.000.000,00	0 Rp 0,00,00	5 Rp 0,00,00	0 Rp 0,00,00	0 Rp 0,00,00	5 Rp 0,00,00	100%	0%	5 Rp 4.776.461.385,60,00	1%	95529%
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Buah	50	Rp 42.600.000,00	0 Rp 42.599.400,00	8 Rp 95.000.000,00	8 Rp 23.078.800,00	8 Rp 0,00,00	8 Rp 0,00,00	8 Rp 0,00,00	8 Rp 23.078.800,00	100%	24%	8 Rp 4.799.540.185,60,00	16%	11266%
				Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	M2	120	Rp 159.000.000,00	0 Rp 158.297.051,00,00	120 Rp 130.000.000,00	0 Rp 0,00,00	120 Rp 0,00,00	0 Rp 0,00,00	0 Rp 0,00,00	120 Rp 0,00,00	100%	0%	120 Rp 4.776.461.385,60,00	100%	3004%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)														100%					
Predikat Kinerja yang Dievaluasi														ST					

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gedangan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	Rp 0,00,00	0 Rp 1.635.988.150,00,00	100	Rp 1.169.532.160,00,00	25	Rp 133.696.900,00,00	25	Rp 67.424.348,00,00	25	Rp 269.467.602,00,00	25	Rp 145.351.450,00,00	100	Rp 615.940.300,00,00	100%	52%	100	Rp 2.251.928.450,00,00	100%	0%	Kecamatan Gedangan																																
					95	0	80	20	20	20	80	100%	84%	80	0%																																											
					Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan																											
																																PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	100	Rp 0,00,00	0 Rp 1.635.988.150,00,00	100	Rp 1.169.532.160,00,00	25	Rp 133.696.900,00,00	25	Rp 67.424.348,00,00	25	Rp 269.467.602,00,00	25	Rp 145.351.450,00,00	100	Rp 615.940.300,00,00	100%	52%	100	Rp 2.251.928.450,00,00	100%	0%	Kecamatan Gedangan		
																																Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan	Laporan	8	Rp 0,00,00	0 Rp 248.325.000,00,00	8	Rp 464.350.000,00,00	2	Rp 86.612.500,00,00	2	Rp 0,00,00	2	Rp 0,00,00	2	Rp 0,00,00	8	Rp 86.612.500,00,00	100%	18%	8	Rp 1.722.600.650,00,00	100%	0%			
																																Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	4	Rp 252.765.600,00,00	0 Rp 248.325.000,00,00	4	Rp 464.350.000,00,00	1	Rp 86.612.500,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	4	Rp 86.612.500,00,00	100%	18%	4	Rp 1.722.600.650,00,00	100%	681%			
																																Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	100%	0%	2	0	2	100%	0%			
																																			Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	4	0	4	100%	0%	4	0	4	100%	0%	
																																			Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	100%	0%	2	0	2	100%	0%	
																																Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	12000	Rp 0,00,00	0 Rp 57.976.500,00,00	9600	Rp 57.464.800,00,00	1973	Rp 3.136.000,00,00	5043	Rp 0,00,00	4121	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	11137	Rp 3.136.000,00,00	100%	5%	11137	Rp 1.639.124.150,00,00	92%	0%			
																																			Jumlah pelayanan umum yang diterima	berkas	12000	Rp 59.702.700,00,00	0 Rp 57.976.500,00,00	9600	Rp 57.464.800,00,00	1973	Rp 3.136.000,00,00	5043	Rp 0,00,00	4121	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	11137	Rp 3.136.000,00,00	100%	5%	11137	Rp 1.639.124.150,00,00	92%	2745%	
																																Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	Orang	100	60	45	0	0	45	0	45	0	45	100%	105	100%	0	0	105	100%	0	0	105	100%	0		
																																			Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, agama dan lingkungan hidup	laporan	16	Rp 0,00,00	0 Rp 1.329.686.650,00,00	16	Rp 647.717.360,00,00	4	Rp 43.948.400,00,00	4	Rp 0,00,00	4	Rp 0,00,00	4	Rp 0,00,00	16	Rp 43.948.400,00,00	100%	6%	16	Rp 1.679.936.550,00,00	100%	0%	
																																Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	Berkas	4	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	
Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2	berkas	95	Rp 2.903.175,00,00	0 Rp 2.150.000,00,00																															0	Rp 13.500.000,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	0%	0	0%	0	Rp 1.635.988.150,00,00	0%	56351%				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	Kegiatan	1	Rp 1.342.156.259,00,00	0 Rp 1.326.036.650,00,00	1	Rp 634.217.360,00,00	0	Rp 43.948.400,00,00	1	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	1	Rp 43.948.400,00,00	100%	6%	1	Rp 1.679.936.550,00,00	100%	125%																																			
			Jumlah kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0																															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan	Kegiatan	3	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0																																	
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)														100%																																												
Predikat Kinerja yang Dievaluasi														ST																																												

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gedangan	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	Rp 0,00,00	0 Rp 412.343.625,00,00	100	Rp 322.629.000,00,00	25	Rp 52.700.640,00,00	25	Rp 72.313.460,00,00	25	Rp 91.274.960,00,00	25	Rp 105.401.280,00,00	100	Rp 321.690.340,00,00	100%	99%	100	Rp 734.033.965,00,00	100%	0%	Kecamatan Gedangan																															
					95	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16																											
					Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan																											
																															PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	Rp 0,00,00	0 Rp 412.343.625,00,00	100	Rp 322.629.000,00,00	25	Rp 52.700.640,00,00	25	Rp 72.313.460,00,00	25	Rp 91.274.960,00,00	25	Rp 105.401.280,00,00	100	Rp 321.690.340,00,00	100%	99%	100	Rp 734.033.965,00,00	100%	0%	Kecamatan Gedangan		
																															Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman	Laporan	4	Rp 0,00,00	0 Rp 412.343.625,00,00	4	Rp 322.629.000,00,00	1	Rp 52.700.640,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	4	Rp 52.700.640,00,00	100%	16%	4	Rp 465.044.265,00,00	100%	0%			
																															Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	Rp 363.409.000,00,00	0 Rp 354.531.125,00,00	2	Rp 215.454.000,00,00	1	Rp 35.338.140,00,00	0	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	2	Rp 35.338.140,00,00	100%	16%	2	Rp 447.681.765,00,00	100%	123%			
																															Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
																																		Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial, Agama dan Masyarakat yang telah dilaksanakan	Kegiatan	3	Rp 57.973.300,00,00	0 Rp 57.812.500,00,00	3	Rp 107.175.000,00,00	1	Rp 17.362.500,00,00	1	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	3	Rp 17.362.500,00,00	100%	16%	3	Rp 429.706.125,00,00	100%	741%	
																															Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)														100%												
																															Predikat Kinerja yang Dievaluasi														ST												

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gedangan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	Rp 0,00,00	0 Rp 2.030.000,00,00	100	Rp 58.427.000,00,00	25	Rp 280.000,00,00	25	Rp 2.277.000,00,00	25	Rp 56.200.000,00,00	25	Rp 300.000,00,00	100	Rp 59.057.000,00,00	100%	101%	100	Rp 61.087.000,00,00	100%	0%	Kecamatan Gedangan
					95	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Gedangan	
																										PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan	kegiatan	1	Rp 0,00,00	0 Rp 2.030.000,00,00	2	Rp 58.427.000,00,00	1	Rp 280.000,00,00	0	Rp 0,00,00	1	Rp 0,00,00	0	Rp 0,00,00	2	Rp 280.000,00,00	100%	0%	2	Rp 2.310.000,00,00	100%	0%			
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)														100%												
Predikat Kinerja yang Dievaluasi														ST												






**Checklist Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penyusunan  
Renstra  
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo  
Periode Renstra : 2021 - 2026**

RPJMD Kabupaten / Kota	Renstra - Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kesesuain / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil TindakLanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi dan Misi						
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	v		Indikator sasaran : persentase permasalahan trantibum yang <b>difasilitasi</b> diganti menjadi <b>diselesaikan</b>	Merubah indikator sasaran	Indikator sasaran : persentase permasalahan trantibum yang <b>difasilitasi</b> berubah menjadi persentase permasalahan trantibum yang <b>diselesaikan</b>
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	v		Disesuaikan dengan Tabel T-C 26 (Hal 203)	Menyesuaikan Tabel 5.1 pada Bab V	Tabel 5.1 pada bab V sudah disesuaikan dengan Tabel T-C 26
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah	v		- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan telah dilimpahkan ke DPMPSTP - Penulisan target SAKIP, RB ditulis huruf beserta angka / A (90)	- Menyesuaikan target dan pendanaan terkait kegiatan perizinan - Menyesuaikan penulisan target SAKIP dan RB	- Target dan pendanaan padamatriks renstra terkait kegiatan perizinan telah disesuaikan - Target SAKIP dan RB ditulis huruf beserta angka
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan dan Dana Indikatif	v				

  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
 KECAMATAN GEDANGAN  
 INFRASTRUKTUR DAN PERENCANAAN  
 INDRATI SETIAWATI, S.STP, MPA  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19770924 199701 2001

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman



## KECAMATAN GEDANGAN


### *STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)*

#### MEKANISME REVIU RENSTRA

No.Dok. : SOP/ /438.7.4/2023

Tanggal Diterbitkan	: Maret 2023
Revisi	: 01

Dibuat Oleh :	Ditinjau oleh :	Disetujui oleh :
		
RIZKY ROSAWATI, SE	ARDI ANINDITA, S. STP, M.Sosio	INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

## 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan SOP Mekanisme Reviu Renstra adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi tim penyusun dokumen perencanaan dalam melakukan Reviu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dokumen tersusun sesuai dengan kaidah penyusunan yang ditetapkan, dan relevan dengan alasan keberadaan Kecamatan Gedangan.


## 2. RUANG LINGKUP

SOP Mekanisme Reviu Renstra merupakan implementasi SAKIP pada Kecamatan Gedangan, mulai dari tahap penentuan isu – isu strategis, perumusan core business OPD, analisa SWOT, hingga kesimpulan akhir.

## 3. DEFINISI

Reviu Renstra adalah proses melakukan evaluasi atas dokumen Renstra yangtelah disusun sebelumnya, dimana evaluasi yang dilakukan meliputi :


1. Ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
2. Indikator keberhasilan kinerja, baik untuk Tujuan, Sasaran, Program maupun Kegiatan;
3. Target yang telah ditetapkan sebelumnya
4. Capaian kinerja tahun berjalan yang tetuang dalam dokumen Laporan Kinerja / LAKIP
5. Diharapkan reivew akan menghasilkan kualitas dokumen RENSTRA lebih baik dari sebelumnya.

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

#### 4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam SOP Mekanisme Reviu Renstra antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- j. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerdehaan Birokrasi

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	No. Rev.	01
		Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

## 5. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Reviu Renstra adalah sebagai berikut :

### 5.1 Ketua


Ketua adalah jabatan yang diperankan oleh Camat Gedangan dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memberikan pengarahan kepada tim Reviu Renstra secara langsung maupun berjenjang berupa kebijakan dan peraturan daerah berkaitan dengan implementasi SAKIP dan informasi-informasi lain yang dianggap perlu.
- b. Meminta keterangan/informasi dari tim Reviu Renstra baik secara langsung maupun berjenjang tentang perkembangan pelaksanaan Reviu Renstra.
- c. Menandatangani laporan hasil Reviu Renstra yang diajukan setelah melalui proses analisa dan pembahasan secara berjenjang dan menyampaikan laporan hasil Reviu Renstra.

### 5.2 Sekretaris

Sekretaris adalah jabatan yang diperankan oleh Sekretaris Camat dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memastikan pemberitahuan akan dilaksanakan Reviu telah terkirim kepada masing-masing pelaksana kegiatan;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana-prasarana penunjang untuk melaksanakan Reviu Renstra antara lain sarana mobilisasi, alat-alat ukur, ATK dll;
- c. Membantu ketua untuk memperoleh informasi awal yang diperlukan dari tim Reviu Renstra;
- d. Membantu ketua untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada tim Reviu Renstra;
- e. Membantu penanggungjawab untuk melakukan reviu atas laporan hasil Reviu Renstra;


	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

- f. Memverifikasi laporan hasil Reviu Renstra;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Reviu Renstra.

### 5.3 Anggota

Anggota adalah jabatan yang diperankan oleh Kasubag Perencanaan & Keuangan dengan tugas dan kewajiban antara lain :


- a. Melaksanakan kegiatan Reviu Renstra yang dihadiri oleh seluruh pelaksana kegiatan
- b. Memberikan pertimbangan yang diperlukan atas permasalahan yang dijumpai pada Reviu Renstra, dengan memberikan penjelasan teknis.
- c. Melakukan komunikasi dengan ketua atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Reviu Renstra, untuk memastikan proses Reviu Renstra berjalan dengan lancar.
- d. Melakukan reviu dan validasi atas usulan perubahan dari masing-masing pelaksana kegiatan, dengan menilai kecukupan relevansinya dengan kaidah penyusunan yang ada.
- e. Selanjutnya menyampaikan keputusan dimaksud kepada Camat Gedangan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Reviu Renstra.

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman


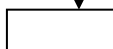
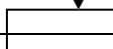

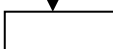
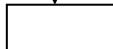
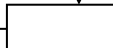

## 6. URAIAN PROSEDUR


1.	Camat memerintahkan seluruh pelaksana kegiatan untuk melakukan Reviu kinerjanya
2.	Pejabat / Staf Perencanaan membuat draft perubahan renstra
3.	Pejabat / Staf Perencanaan menghimpun draft perubahan renstra
4.	Sekretaris Camat memerintahkan dan memimpin rapat pembahasan Reviu renstra
5.	Camat menganalisa dan melakukan pembahasan usulan perubahan
6.	Pejabat / Staf Perencanaan menyampaikan usulan perubahan kepada Bappeda
7.	Usulan perubahan Renstra dibahas bersama oleh Tim Verifikator
8.	Penyampaian hasil pembahasan oleh Tim Verifikator
9.	Konsolidasi hasil pembahasan oleh Camat
10.	Pejabat / Staf Perencanaan menyusun laporan perubahan renstra

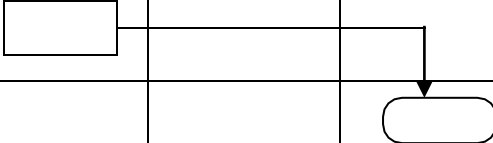
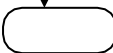



	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	No. Rev.	01
		Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

## 7. ALUR SOP

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KET
		Kepala OPD	Sekretaris OPD	Pejabat / Staf Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk melakukan Reviu terhadap kinerja masing - masing				Capaian Kinerja	1 Hari	Usulan	
2.	Membuat draft konsep usulan perubahan				Konsep Usulan	1 Hari	Format	
3.	Menghimpun konsep usulan perubahan				Draft	1 Hari	Usulan Perubahan	
4.	Mengadakan rapat pembahasan Reviu Renstra				Seluruh ASN	1 Hari	Laporan Rapat	
5.	Analisa dan Pembahasan usulan perubahan				Laporan Rapat	1 Hari	Rancangan Perubahan	
6.	Penyampaian usulan perubahan kepada Bappeda				Rancangan Perubahan	1 Hari	Surat pengiriman ke Bappeda	
7.	Pembahasan dengan Tim (Bappeda, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Organisasi)				Undangan dari Bappeda	1 Hari	Berita Acara Hasil Reviu	
8.	Evaluasi dan Analisa dari hasil pembahasan dengan Tim				Berita Acara Hasil Reviu	1 Hari	Berita Acara Hasil Reviu	

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/ /438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KET
		Kepala OPD	Sekretaris OPD	Pejabat / Staf Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Konsolidasi hasil pembahasan dengan seluruh ASN				Berita Acara Hasil Reviu	1 Hari	Laporan Rapat	
10.	Penyusunan laporan perubahan Renstra				Laporan Rapat	1 Hari	Renstra Perubahan	

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Dok.	SOP/005/438.7.16/2023
		No. Rev.	01
	<b>MEKANISME REVIU RENSTRA</b>	Tanggal	Maret 2023
		Halaman	9 halaman

#### 8. CATATAN MUTU

Dokumen pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini :

- a. Laporan Kinerja OPD
- b. Laporan Kinerja Individu
- c. Matriks Reviu Renstra 2021-2026

**BERITA ACARA**  
**HASIL PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN GEDANGAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

**Nomor : 188/54/438.7.4/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/36/438.7.4/2023, tanggal 4 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

**I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD**

**a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Review**

<b>SASARAN</b> (Sebelum Perubahan)	<b>SASARAN</b> (Sesudah Perubahan)	<b>KETERANGAN</b>
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tetap
Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	Indikator Kinerja : a. Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan b. Nilai RB c. Nilai IPP	Baru
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran 2 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator Kinerja : Presentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja : Presentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	Baru

## 1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>2. Mengisi LKE dari Inspektorat.</li> </ol>	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA dengan hasil penilaian 90-100</li> <li>2. A untuk hasil nilai 80-90</li> <li>3. BB untuk hasil nilai 70-80</li> <li>4. B untuk hasil nilai 60-70</li> <li>5. CC untuk hasil nilai 50-60</li> <li>6. C untuk hasil nilai 30-50</li> <li>7. D dengan hasil nilai 0-30</li> </ol>
Nilai RB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> <li>2. Mengisi LKE dari inspektorat</li> </ol>	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform
Nilai IPP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ol>	<p>Indeks penilaian sebagai Berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 0 – 1,00 F Gagal</li> <li>b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk</li> <li>c. 1,51 – 2,00 D Buruk</li> <li>d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)</li> <li>e. 2,51 – 3,00 C Cukup</li> </ol>

	2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima
--	--	--

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Reviu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026
2. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 masih dapat digunakan/ relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Kecamatan Gedangan di Tahun 2023 ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Maret 2023

SAMAT GEDANGAN



**Dr. HERI SOESANTO, SH, MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680519 198803 1 002

**INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA**

Pembina Tingkat I  
NIP. 197709204 199701 2 001

## JADWAL TENTATIVE PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026 KECAMATAN GEDANGAN

No	TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PD	JADWAL TENTATIVE
A.	A. PERSIAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA	
	Pembentukan Rancangan Keputusan Camat tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-I Januari 2023
B.	B. PENYUSUNAN RANCANGAN	
	Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra	Minggu ke- 2 Januari 2023- Minggu ke 2 Februari 2023
	Fasilitasi Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda	Minggu ke – 4 Februari 2023
C.	C. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR	
	Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra	Minggu ke – 2 Maret 2023
D.	D. PENETAPAN	
	Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi	Minggu ke – 2 Maret 2023
	Verifikasi Rancangan Akhir oleh Bappeda	Minggu ke – 3 Maret 2023
	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra	Minggu ke – 4 Maret 2023 s/d Minggu ke-2 April
	Penyampaian kembali Rancangan Akhir Renstra yang telah disempurnakan kepada Kepala Bappeda	Minggu ke- 1 Mei 2023
	Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Minggu ke – 3 Mei 2023
	Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perbup	Minggu ke -2 Juni 2023



Dokumentasi Pembahasan  
Perubahan Renstra 2021-2026